ISSN 3123-2973
JURNAL PAJAK POPULIS
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/populis
Volume 2 (1) 2026, 191 - 197

EMPOWERING MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) THROUGH TAX LITERACY AT LOCAL PRODUCT CENTER MALAYSIA

Lukmanul Hakim[1*], Husnul Khotimah[2], Wiwit Irawati[3]
[1]Universitas Pamulang, [2] Universitas Pamulang, [3]Universitas Pamulang
Email: 02722@unpam.ac.id

Article History: Received on 05 Mei 2026, Revised on 08 Juli 2026, Published on 20 Juli 2026

ABSTRACT

A community service program designed to improve the capacity of MSMEs to understand and manage their tax obligations effectively and efficiently. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of the Malaysian economy, contributing more than 38% of the national Gross Domestic Product (GDP) and employing approximately 48% of the workforce. The Local Product Center Malaysia serves as a center for the exhibition and sale of local products produced by MSMEs, serving as a vital bridge between local producers and the wider market. However, many MSMEs within the Local Product Center Malaysia face significant challenges in understanding the tax system. Limited knowledge of tax obligations, reporting procedures, and available tax incentives leads to unintentional non-compliance. This can result in administrative sanctions, missed incentive opportunities, and obstacles to long-term business development. The training was conducted as an interactive workshop covering basic microeconomic theory, an introduction to the components of the tax system, and hands-on practice in preparing financial reports using a simple Excel-based format. Participants were also provided with case studies and guidance on preparing reports tailored to the needs of each institution.

***Keywords**: MSMEs, Socialization, Tax System*

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami dan mengelola kewajiban perpajakan mereka secara efektif dan efisien. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Malaysia, menyumbang lebih dari 38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 48% tenaga kerja. Local Product Center Malaysia berfungsi sebagai pusat pameran dan penjualan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM, menjadi jembatan penting antara produsen lokal dengan pasar yang lebih luas. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang tergabung dalam Local Product Center Malaysia menghadapi tantangan signifikan dalam memahami sistem perpajakan. Keterbatasan pengetahuan tentang kewajiban pajak, prosedur pelaporan, serta insentif pajak yang tersedia menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Kondisi ini dapat berakibat pada sanksi administratif, kehilangan peluang insentif, dan hambatan dalam pengembangan usaha jangka panjang. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop interaktif yang mencakup materi teori dasar ekonomi mikro, pengenalan komponen system perpajakan, serta praktik langsung penyusunan laporan keuangan menggunakan format sederhana berbasis Excel. Peserta juga diberikan contoh kasus bimbingan dalam membuat laporan sesuai kebutuhan masing-masing lembaga.

Kata Kunci: UMKM, Sosialisasi, Sistem perpajakan.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Malaysia, menyumbang lebih dari 38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 48% tenaga kerja. Local Product Center Malaysia berfungsi sebagai pusat pameran dan penjualan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM, menjadi jembatan penting antara produsen lokal dengan pasar yang lebih luas.Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang tergabung dalam Local Product Center Malaysia menghadapi tantangan signifikan dalam memahami sistem perpajakan. Keterbatasan pengetahuan tentang kewajiban pajak, prosedur pelaporan, serta insentif pajak yang tersedia menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Kondisi ini dapat berakibat pada sanksi administratif, kehilangan peluang insentif, dan hambatan dalam pengembangan usaha jangka panjang.

Ketidakpahaman terhadap sistem perpajakan membawa konsekuensi yang merugikan bagi keberlanjutan usaha UMKM. Secara finansial, pelaku usaha seringkali membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya karena tidak mengetahui potongan dan pengurangan yang dapat diklaim. Sebaliknya, ada pula yang tidak membayar pajak secara tepat sehingga menghadapi risiko audit, denda, dan sanksi administratif yang dapat menguras kas usaha.

Dari segi operasional, waktu dan tenaga yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pengembangan produk dan pemasaran justru tersita untuk mengurus masalah perpajakan yang rumit. Lebih jauh lagi, UMKM yang tidak tertib administrasi pajaknya mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal dari bank atau lembaga keuangan karena tidak dapat menyajikan laporan keuangan dan bukti kepatuhan pajak yang memadai.

Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat transformasi UMKM dari usaha informal menjadi entitas bisnis yang terstruktur dan berkelanjutan. Ketidakpatuhan pajak juga menciptakan citra negatif yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Oleh karena itu, intervensi melalui program literasi pajak menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sarana praktik, kurangnya tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri, serta perlunya peningkatan kualitas manajemen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, pengelolaan administrasi dan keuangan di banyak SMK juga masih perlu diperbaiki agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat peran SMK sebagai lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing. Selain itu perlunya setiap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengelola keuangannya dengan baik.

Local Product Center Malaysia merupakan sebuah inisiatif strategis yang didirikan untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh wilayah Malaysia. Platform ini berfungsi sebagai pusat pameran atau showcase permanen yang menampilkan keragaman dan keunikan produk lokal, mulai dari makanan olahan tradisional, kerajinan tangan khas daerah, tekstil dengan motif etnik, hingga berbagai produk inovasi berbasis teknologi yang mencerminkan kreativitas dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan pusat ini tidak hanya menjadi wadah promosi, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

UMKM di Malaysia, sebagaimana halnya di banyak negara berkembang lainnya, memainkan peranan penting dalam memperkuat struktur ekonomi domestik. Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan sangat signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (KUSKOP), sektor UMKM menyumbang lebih dari 38% terhadap PDB dan mempekerjakan sekitar dua pertiga dari

total tenaga kerja di negara tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan wadah seperti Local Product Center Malaysia menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memperluas akses pasar, meningkatkan visibilitas produk lokal, serta memperkuat daya saing pelaku UMKM di tingkat nasional maupun internasional.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Regulasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah di Malaysia

1. Peran dan Definisi UKM dalam Konteks Ekonomi Malaysia

   Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium Enterprises/SMEs) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Malaysia. Sebagian besar unit usaha di Malaysia diklasifikasikan sebagai SME, dimana prinsipnya menyediakan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu, definisi yang jelas mengenai SME menjadi dasar dari seluruh kebijakan regulasi yang menyertainya. SME di Malaysia ditentukan berdasarkan kriteria pendapatan tahunan dan jumlah tenaga kerja, yang dibakukan oleh SME Corporation Malaysia (SME Corp) sebagai lembaga koordinator utama kebijakan SME di bawah Kementerian Pembangunan Usaha & Koperasi (MECD). Misalnya, sektor manufaktur dikategorikan sebagai SME jika pendapatan tahunan tidak melebihi RM50 juta atau tenaga kerja tidak lebih dari 200 orang, sedangkan sektor jasa dan sektor lainnya memiliki ambang pendapatan maksimal RM20 juta atau jumlah karyawan tidak lebih dari 75 orang. Definisi ini penting karena memberikan batas operasional regulasi dan program bantuan yang ditujukan oleh pemerintah bagi pelaku SME.

2. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Malaysia

   Malaysia telah membangun kerangka kebijakan yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan SME. Regulasi dan kebijakan dirancang tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan dan fasilitasi pertumbuhan. Institusi sentral seperti SME Corp Malaysia berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku UKM, serta menjadi sekretariat bagi National SME Development Council (NSDC), yang menetapkan strategi nasional terkait SME. NSDC melakukan harmonisasi kebijakan di berbagai sektor pemerintahan untuk memastikan dukungan lintas sektor bagi SME. → Hal ini menunjukkan bahwa peran regulasi bukan hanya sekedar alat kontrol, tetapi juga memberi arah bagi pertumbuhan usaha dan pengembangan kapasitas. Kerangka regulasi SME dialamatkan melalui berbagai program, termasuk penyederhanaan perizinan/tata usaha, peningkatan akses pada pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi dan inovasi bisnis. Contoh kebijakan ini mencakup penyediaan insentif pajak bagi SME untuk investasi teknologi hijau atau digital, kemudahan administrasi perpajakan, serta program pelatihan usaha. Insentif pajak seperti tax deduction untuk proyek tertentu merupakan bagian dari pendekatan fiskal Malaysia dalam merangsang inovasi dan pertumbuhan SME.

3. Implementasi Kebijakan UKM di Malaysia

   Implementasi regulasi terhadap SME di Malaysia menjadi fokus banyak studi akademik dan kajian kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia telah melakukan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program pengembangan UKM yang mencakup pemberdayaan, peningkatan kemampuan manajerial, akses modal, dan kemitraan antar pelaku usaha. Namun, efektivitas implementasi ini sering kali bergantung pada kapasitas internal SME untuk memenuhi persyaratan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Penerapan kerangka regulasi juga termasuk program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi pengusaha. Program pendidikan kewirausahaan, workshop, dan literasi bisnis merupakan bagian dari pendekatan pemerintah dalam membantu usaha kecil agar lebih siap menghadapi persaingan, termasuk di era digital. Hal ini sejalan dengan bukti di mana digitalisasi menjadi komponen penting dalam mempertahankan daya saing UKM di pasar global

dan domestik, meskipun adopsi teknologi di kalangan SME masih bervariasi.

4. Tantangan dalam Regulasi dan Kepatuhan

Meskipun Malaysia memiliki kerangka regulasi yang relatif matang, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu aspek yang sering dibahas dalam literatur adalah kompleksitas administratif dan regulasi yang masih menjadi hambatan bagi SME dalam mematuhi kewajiban hukum. SME seringkali kurang sumber daya untuk memenuhi persyaratan regulasi, baik dalam hal dokumentasi, pelaporan pajak, ataupun perizinan usaha yang berkaitan dengan sektor spesifik. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk lebih menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan bantuan teknis bagi pelaku usaha agar dapat lebih mudah dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, terutama dalam aspek kualitas produk, keselamatan kerja, dan perlindungan konsumen. Regulasi terkait standar ini terutama penting untuk SME yang ingin menembus pasar internasional dengan produk mereka. Sementara itu, sistem pelaporan keuangan yang baik, misalnya dengan standar akuntansi yang diadopsi, juga menjadi bagian dari tantangan yang perlu diatasi oleh SME agar dapat memenuhi kriteria investasi atau pembiayaan formal.

5. Peran Regulasi dalam Mendorong Daya Saing dan Inovasi

Regulasi di Malaysia juga diarahkan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing UKM. Hal ini terlihat pada kebijakan yang mendukung integrasi rantai pasok dan adopsi teknologi baru, termasuk digitalisasi operasi bisnis. Banyak literatur yang menunjukkan bahwa aspek institutional framework, termasuk dukungan regulasi, merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan beradaptasi UKM dalam menghadapi tantangan pasar. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mendorong SME untuk memanfaatkan fasilitas yang ada guna meningkatkan efisiensi dan menjembatani akses ke pasar yang lebih luas.

6. Integrasi dengan Kebijakan Regional dan Internasional

Sebagai bagian dari ASEAN, regulasi UKM di Malaysia juga dihubungkan dengan kerangka kerja regional yang lebih luas. Laporan ASEAN SME Policy Index mencatat bahwa Malaysia telah membuat kemajuan dalam memperkuat kerangka regulasi yang mendukung UKM dibandingkan banyak negara ASEAN lainnya. Hal ini mencakup harmonisasi definisi, peningkatan layanan administratif, dan strategi nasional untuk mendukung pertumbuhan UKM dalam konteks ASEAN. Integrasi ini penting untuk meningkatkan daya saing regional UMKM serta memperluas peluang akses pasar di luar negeri.

7. Evaluasi dan Arah Penelitian Selanjutnya

Literatur yang ada menunjukkan bahwa meskipun banyak kemajuan dalam kerangka regulasi UKM di Malaysia, masih terdapat celah penelitian, terutama terkait dampak nyata berbagai kebijakan terhadap kinerja usaha kecil di setiap sektor. Evaluasi komprehensif mengenai efektivitas insentif fiskal, perizinan, akses ke pembiayaan, atau dampak digitalisasi terhadap pertumbuhan usaha UKM masih dibutuhkan untuk memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan. Selain itu, studi yang lebih fokus pada pengalaman pelaku UKM dalam konteks regulasi dapat memberikan wawasan yang lebih kaya bagi pembuat kebijakan. Penguatan kapasitas data statistik tentang UKM juga menjadi elemen penting guna meningkatkan dasar pengambilan keputusan kebijakan.

METODE PELAKSANAAN PKM

Program pengabdian masyarakat ini diselenggarakan melalui serangkaian

proses mulai dari tahap analisis sosial, perencanaan program, penerapan program hingga evaluasi untuk keberlanjutan program. Sosialisasi dan edukasi ini menyasar para stakeholder yang ada di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Local Product Center Malaysia, Adapun metode pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Kegiatan
   Kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan praktik langsung, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teori, tetapi juga mampu langsung menerapkan teknik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masing-masing. Pendekatan ini menekankan *"learning by doing"*, di mana peserta terlibat aktif dalam setiap tahap kegiatan.

2. Tahap Persiapan
   Persiapan dilakukan beberapa minggu sebelum pelaksanaan pelatihan dan mencakup beberapa langkah berikut: Survei awal: Tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan, jenis transaksi, permasalahan yang sering muncul, dan kebutuhan peningkatan kapasitas staf administrasi. Penyusunan modul pelatihan: Materi yang disiapkan meliputi teori dasar akuntansi, jenis laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, arus kas), teknik pencatatan transaksi, serta panduan penggunaan aplikasi Excel atau software akuntansi ringan. Koordinasi dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Menentukan jadwal pelatihan, tempat, jumlah peserta, dan perangkat pendukung seperti komputer, proyektor, dan materi cetak.

3. Pelaksanaan Pelatihan
   Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa sesi yang dirancang agar peserta memperoleh pemahaman teoritis sekaligus praktik nyata:

   a. Sesi Teori
   Pengenalan konsep dasar akuntansi, pentingnya pencatatan transaksi, dan prinsip akuntabilitas keuangan.
   Penjelasan mengenai komponen laporan keuangan: neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Diskusi tentang permasalahan umum pengelolaan keuangan di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dampaknya terhadap akuntabilitas.

   b. Sesi Praktik
   Peserta melakukan pencatatan transaksi keuangan sederhana berdasarkan kasus nyata Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
   Latihan penyusunan laporan keuangan menggunakan format Excel atau aplikasi akuntansi sederhana. Simulasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana BOS, sumbangan, serta biaya operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lainnya.

   c. Diskusi dan Tanya Jawab
   Peserta membahas kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan keuangan. Tim pengabdian memberikan solusi, tips, dan strategi pencatatan yang lebih efektif dan transparan.

4. Pendampingan dan Evaluasi
   Pendampingan lanjutan: Setelah pelatihan, tim memberikan bimbingan untuk memastikan peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh secara berkelanjutan. Evaluasi keterampilan peserta: Dilakukan melalui penilaian hasil laporan keuangan

yang dibuat peserta, serta kemampuan mereka menjelaskan proses pencatatan dan penyusunan laporan. Umpan balik: Tim memberikan saran perbaikan dan rekomendasi pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan efisien.

5. Tindak Lanjut
   Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Local Product Malaysia disarankan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan sebagai panduan tetap. Tim pengabdian dapat melakukan monitoring berkala untuk menilai implementasi pelatihan dan memberikan pendampingan tambahan jika diperlukan. Diharapkan dengan adanya tindak lanjut ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan laporan keuangan secara berkelanjutan.

HASIL PELAKSANAAN PKM DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan perpajakan. Selain itu, peserta mampu menerapkan sistem pencatatan yang lebih tertib dan transparan, sehingga mendukung UMKM Local Product Malaysia dalam membuat laporan keuangan serta mengetahui peraturan perpajakannya.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi UMKM Local Product Malaysia dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan dapat menjadi langkah awal menuju penerapan sistem administrasi keuangan yang lebih profesional di lingkungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran pajak di kalangan masyarakat, khususnya dalam aspek kepatuhan dan kontribusi terhadap pembangunan.

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tidak hanya melakukan sosialisasi tentang bagaimana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Local Product Malaysia bisa mengelola keuangannya dengan baik. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan aspek penting dalam tata kelola lembaga pendidikan, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah akuntansi dasar.

Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman tentang teknik pencatatan transaksi sering menyebabkan laporan keuangan dan pelaporan perpajakannya disusun secara tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Local Product Malaysia dengan tema " Empowering Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) Through Tax Literacy At Local Product Center Malaysia ", dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pemahaman mengenai Laporan keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Local Product Center Malaysia tersebut masih belum dikuasai dengan baik serta pengetahuan mengenai tata cara pembuatan laporan keuangan masih minim sehingga banyak kesalahan dalam pembuatannya. Tim PKM memberikan penyuluhan dan Latihan untuk pembuatan laporan keuangan serta mengajarkan dasar-dasar Akuntansi dalam laporan keuangan Kegiatan pelatihan ini juga berhasil membekali anggota lembaga dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghitung kewajiban pajak dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pribadi dengan benar. Simulasi dan latihan yang dilakukan selama pelatihan membantu peserta memahami secara praktis bagaimana penerapan skema tarif dalam konteks

perhitungan pajak yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan teknis anggota, maka peserta bisa melakukan secara mandiri dal hl perhitungan pajak.

2. Setelah pelaksanaan PKM ini staff Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Local Product Center Malaysia dapat melakukan pencatatan dan pembukuan dengan baik serta diharapkan dapat melakukan pencatatan, pelaporan serta perhitungan dengan baik sesuai dengan peraturan terbaru dalam PSAK.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Dana Pendidikan di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menengah. Jakarta: BPK RI.

Bank Negara Malaysia. (2023). Small and Medium Enterprise Annual Report 2023. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia. https://www.bnm.gov.my

Department of Statistics Malaysia. (2023). Profile of Small and Medium Enterprises (SMEs) 2023. Putrajaya: DOSM. https://www.dosm.gov.my

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP). (2022). Dasar Keusahawanan Nasional 2030. Putrajaya: KUSKOP. https://www.kuskop.gov.my

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN). (2024). Laporan Tahunan Pembangunan Usahawan dan Industri Tempatan. Kuala Lumpur: KPDN.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Buku Panduan BOS untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menengah Atas dan Kejuruan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Mulyadi. (2019). Akuntansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Laporan Keuangan untuk Lembaga Pendidikan. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyanto, A., & Widodo, R. (2021). “Implementasi Sistem Akuntansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan.” Jurnal Pendidikan dan Administrasi, 7(2), 45–55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wibowo, A. (2020). Manajemen Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Panduan Praktis untuk Bendahara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zulfikar, D., & Haryanto, T. (2022). “Pelatihan Laporan Keuangan Berbasis Excel untuk Tenaga Administrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menengah.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(1), 12–20.